

Respons terhadap RUU HIP dan Restorasi Hagia Sophia:

Sinyal Kerinduan Umat pada Khilafah

Di tengah duka pandemi COVID-19 yang menyelimuti dunia, setidaknya ada dua peristiwa yang menggembirakan pengemban dakwah. Pertama, respons masyarakat Indonesia atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan restorasi Hagia Sophia menjadi masjid.

Kegelisahan dan Kebahagiaan Umat

Saat perhatian masyarakat dunia tersedot oleh badai pandemi, tak terkecuali Indonesia yang dari hari ke hari perkembangan penanganan COVID-19 semakin memprihatinkan, DPR mengusulkan RUU HIP. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 RUU ini, Haluan Ideologi ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta pedoman dalam mempertautkan keberagaman. Ditilik dari fungsinya, jika disahkan RUU ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam seluruh sendi kehidupan.

Bagian paling menarik perhatian dari RUU ini adalah Pasal 7 yang mereduksi Pancasila menjadi trisila bahkan ekasila yang membuat dasar negara sebatas gotong royong. Pasal 7 ini menimbulkan gejala di masyarakat. Organisasi-organisasi besar MUI, PBNU, Muhammadiyah, dan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri menyatakan penolakan atas RUU ini. Salah satu alasannya adalah karena tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran dan Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme dalam draft RUU tersebut (Kompas.com).

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan bahwa rumusan pasal 7 seperti mengulang kembali perdebatan yang telah selesai. Mu'ti juga menegaskan bahwa seharusnya kita tidak memunculkan lagi perdebatan tersebut.

Sedangkan dari kalangan akademisi, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat mengingatkan bahwa RUU ini berpotensi digunakan sebagai alat untuk memukul ideologi lain dan memungkinkan kembali dibukanya ruang bagi komunis di Indonesia (bbc.com)

Setelah menuai penolakan keras dari berbagai kalangan di banyak wilayah, pemerintah dan DPR sepakat untuk menghentikan pembatalan pembahasan RUU HIP. Bahkan gelombang penolakan ini membuat PDIP—sebagai partai yang memiliki sensitivitas ideologi paling tinggi—gentar. Berlagak seolah seorang negarawan sejati Puan Maharani—ketua DPR RI dari PDIP—mengatakan “DPDR dan pemerintah berharap setelah terjadi kesepakatan antara DPR dan pemerintah, segala pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi beberapa minggu terakhir ini terkait RUU HIP dapat diakhiri. Kita Kembali hidup rukun dan damai serta kompak gotong royong melawan pandemi COVID-19 dan dampaknya,” saat menerima draft RUU BPIP dari Mahfudz MD di Gedung DPR RI (16/7/2020) (Kompas.com)

Hingga tulisan ini dibuat, draft RUU BPIP belum dibuka untuk publik. Namun, CNNIndonesia.com yang mengaku mendapatkan salinan resmi RUU BPIP mengatakan bahwa RUU ini terdiri atas 8 bab, 17 pasal, dan 16 halaman. RUU BPIP ini mengakomodasi tuntutan masyarakat yang menginginkan penolakan atas komunisme dalam bagian “Mengingat” yang berbunyi “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Bomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis

Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia”.

Masih merujuk pada CNNIndonesia.com, RUU BPIP ini juga melarang kegiatan yang menyebarkan paham-paham berunsur komunis seperti Marxisme dan Leninisme. “Larangan setiap kegiatan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/ marxisme-leninisme,” demikian bunyi salah satu ketentuan dalam RUU ini.

Di tengah kemarahan umat Islam Indonesia atas RUU HIP, berita mengejutkan datang dari Turki. Erdogan mengumumkan pengalifungsian Hagia Sophia Kembali menjadi masjid setelah selama berpuluh tahun dihinakan menjadi museum. Pengumuman ini disambut penuh suka cita oleh umat Islam. Bukan hanya di Turki, tetapi juga di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Umat tak peduli meski pengembalian fungsi Hagia Sophia menjadi masjid ini memanen kecaman dari tokoh-kotok Barat. Pun tak peduli bahwa Sebagian kalangan menilai ini hanyalah strategi politik Erdogan untuk mengembalikan popularitasnya setelah kerapuhan ekonomi Turki dan ketidakmampuan Turki mengendalikan SARS CoV-2. Meski kecurigaan ini cukup beralasan mengingat Erdogan baru melakukannya setelah 18 tahun berkuasa dan selama ini menolak mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid¹.

Umat hanya merasakan kebanggaan dan kebahagiaan atas Kembali berfungsinya Hagia Sophia menjadi masjid karena di benak umat Hagia Sophia adalah simbol kemenangan pasukan Al Fatih atas Kontantinopel. Simbol kemenangan Islam atas kesyirikan. Simbol kejayaan Utsmani, kekuasaan Islam.

Membaca Respons Masyarakat

Derasnya arus penolakan RUU HIP ini adalah hal yang patut kita syukuri karena menunjukkan sensitivitas publik terhadap upaya reduksi peran agama dalam kehidupan bernegara. Dilihat dari komponen penolak RUU HIP yang didominasi oleh elemen umat Islam, dapat kita baca bahwa penolakan tersebut lahir dari dorongan akidah yang tidak menginginkan kian terpinggirkannya nilai-nilai Islam akibat hilangnya sila “Ketuhanan yang Maha Esa” dan digantikan dengan sebatas gotong royong. Ini adalah modal besar untuk menumbuhkan kesadaran publik tentang pentingnya penerapan syari’at Islam dalam seluruh sendi kehidupan.

Pun demikian suka citanya umat di berbagai belahan Bumi menyambut kembalinya adzan di Hagia Sophia. Ini adalah sinyal kerinduan umat atas ukhuwah yang tak tessekat oleh *nation state*. Hagia Sophia yang berada di Turki dan selama ini menjadi asset Turki menjelma menjadi milik bersama umat Islam sedunia. Menjadi sebab kegembiraan umat di seluruh penjuru Bumi. Kegembiraan ini tentu tak lepas dari kenangan umat atas kejayaannya di masa lalu, saat Utsmani memimpin Kekhilafahan Islam dan membawa umat ini ke puncak kejayaan yang menjadi poros peradaban dunia. Suka cita ini adalah ekspresi dari keinginan terdalam umat untuk kembali bersatu dan meraih kedigdayaannya.

Sayangnya, tidak banyak kalangan yang cukup peka menangkap perasaan umat ini sehingga ekspresi yang muncul pun menjadi bias. Misalnya dengan memunculkan narasi seolah penolakan ini hanya

¹ <https://babas.kompas.id/baca/internasional/2020/07/14/di-balik-langkah-erdogan-mengubah-status-hagia-sophia/>

karena trauma sejarah atas kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) pada medio 1960an. Juga narasi yang mengesankan penolakan ini sebatas karena ketakutan bahwa RUU ini akan dijadikan alat pukul bagi penguasa untuk melumpuhkan lawan politiknya. Pun anggapan bahwa suka cita atas restorasi Hagia Sophia hanyalah sebatas dukungan atas hak prerogatif Erdogan sebagai presiden Turki untuk memutuskan permasalahan internalnya. Atau sebatas kegembiraan mengenang kejayaan masa lalu. Sesungguhnya narasi-narasi ini tidak cukup mengekspresikan perasaan umma atas RUU HIP.

Mewaspada Pengokohan Sekulerisme

Merespons gelombang penolakan yang begitu kuat, pengusung RUU HIP, PDIP tampak melunak. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan "...demikian halnya penambahan ketentuan menimbang guna dan menegaskan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti Marxisme-Komunisme, Kapitalisme-Liberalisme, Radikalisme serta bentuk Khilafahisme juga setuju untuk ditambahkan."

Jika pernyataan Hasto ini diakomodasi dalam merumuskan pengganti RUU HIP, ini justru lebih berbahaya dan bertentangan dengan aspirasi publik penentang RUU HIP. Hal ini karena berkaca dari pengalaman, istilah radikalisme cenderung digunakan sebagai label bagi sejumlah gerakan Islam. Bahkan radikalisme seringkali dilekatkan pada ajaran Islam, yakni jihad.

Di sisi lain, ketika umat telah memahami bahwa Khilafah adalah bagian ajaran Islam dan diskursus di tengah ummat telah berputar pada bagaimana bentuk Khilafah atau Khilafah periode mana yang layak dijadikan rujukan, munculnya diksi Khilafahisme adalah upaya untuk mengesankan bahwa Khilafah adalah ajaran tersendiri yang terpisah dari Islam. Munculnya diksi ini patut diduga sebagai upaya untuk melarang salah satu ajaran Islam, yakni Khilafah. Sedangkan pelarangan atas salah satu ajaran Islam tak ada bedanya dengan pelarangan atas seluruh ajaran Islam.

Demikian pula suka cita umat atas restorasi Hagia Sophia jangan sampai diarahkan untuk mendukung demokrasi. Berhati-hatilah dengan penggiringan opini bahwa demokrasi adalah sistem yang fair, sekulerisme adalah jalan tengah adil. Buktinya, di negeri sekuler yang demokratis seperti Turki, Erdogan yang muslim dapat menduduki tampuk kepemimpinan, bahkan dapat mengembalikan fungsi Hagia Sophia menjadi masjid, mengembalikan simbol kejayaan Islam. Jangan biarkan umat menjadi korban manuver politik para politisi sekuler yang hanya mengeksploitasi dukungan umat demi ambisi pribadi dan kelompoknya. Adalah ironi jika kerinduan umat akan kejayaan Islam justru dikanalisis untuk mendukung sistem yang akan selamanya mengerdilkan dan mengunci Islam di sudut ruang-ruang privat. Sistem yang tidak akan membiarkan Islam menjadi nafas peradaban.

Mengekspresikan Aspirasi Ummat dengan Narasi yang Benar

Ada benang merah yang menghubungkan antara kemarahan muslim Indonesia atas RUU HIP dan suka cita muslim dunia atas kumandang adzan dari Hagia Sophia yakni: 1. Kekhawatiran semakin tersingkirkannya peran syari'at dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta 2. Kerinduan akan kejayaan yang berlangsung saat agama menjadi poros peradaban yang disimbolkan dengan alih fungsi simbol puncak peradaban saat itu yakni Hagia Sophia menjadi masjid.

Sayangnya seperti yang dikatakan oleh Syaikh Taqiyyuddin An Nabhani dalam At Takatul al Hizbiy bahwa saking jauhnya umat dari pemikiran dan kehidupan Islam umat kebingungan mengungkapkan apa yang dirasakan dan / atau diinginkannya dengan ungkapan yang Islami. Alih-alih itu, umat malah sibuk mencari padanan istilah dari peradaban lain yang dianggap mewakili perasaan dan / atau keinginannya.

Tanpa sadar, pemilihan istilah-istilah tersebut untuk mengungkapkan perasaan dan / atau keinginannya justru akan menyeret umat semakin jauh terperosok dalam peradaban lain tersebut (misalnya: peradaban Barat) yang sejatinya bertolak-belakang dengan keinginan dan / atau perasannya tersebut. Untuk itulah, pengemban dakwah harus mampu membaca dengan jelas perasaan dan / atau keinginan terdalam umat lalu mengekspresikannya dengan ungkapan yang benar.

Contohnya: ketika umat resah karena berada dalam kehidupan yang menempatkan perempuan sebatas dapur, sumur, dan kasur. Kehidupan yang menjadikan perempuan warga kelas dua dan tertindas. Pada saat yang sama umat jauh dari pemikiran Islam, tidak mengenal syari'at Islam dan tidak memiliki gambaran bagaimana Islam memposisikan laki-laki dan perempuan. Literatur yang dibaca oleh simpul-simpul umat (baca: para cendekia dan aktivis) adalah literatur Barat. Yang umat saksikan adalah pengaturan ala Kapitalisme Liberalisme. Maka, umat hanya menemukan ungkapan yang mendekati keinginannya adalah feminisme, yang seolah-olah mengangkat perempuan dari statusnya sebagai warga kelas dua. Padahal, gagasan feminisme justru akan membuat para Muslimah semakin menderita.

Itulah gambaran umat di Indonesia saat ini. Umat diliputi kegalauan dan kekhawatiran akan bangkitnya Komunisme yang penuh kekejaman dan memaksa mereka mendurhakai Tuhannya. Umat takut jika poin ketuhanan tidak lagi tercantum sebagai dasar negara, maka kehidupan ini semakin jauh dari rahmat. Sayangnya umat tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana aturan Islam tentang kehidupan bernegara. Umat tak pernah punya gambaran tentang bagaimana harmonisasi kehidupan super-heterogen dalam pengaturan negara berdasarkan Islam. Literatur yang mereka dapati adalah tentang Sekularisme yang menjadi musuh kediktatoran Komunisme. Maka, mereka pun merasa terwakili oleh Sekularisme yang memberikan kebebasan kepada siapa pun untuk menyembah Tuhannya meski ketuhan hanya dijadikan simbol dan tidak benar-benar berperan dalam kehidupan bernegara.

Umat Islam di berbagai penjuru Bumi menginginkan kembali kejayaan yang pernah diraih pada masa lampau. Umat merindukan kedudukan sebagai pemimpin peradaban yang pernah diraih para pendahulu. Tetapi umat tidak tahu bagaimana para pendahulu itu meraih kedudukannya sebagai pemimpin peradaban. Umat juga tidak punya gambaran melalui system seperti apa para pendahulu merawat kejayaannya. Yang umat saksikan adalah ilusi keberhasilan Erdogan dalam mengembalikan simbol kejayaan Islam. Maka, tidak mengherankan jika restorasi Hagia Sophia menjadi amplifier seruan agar umat berpartisipasi aktif dalam Demokrasi. Umat didorong menjadi pejuang Demokrasi yang pada hakikatnya justru akan terus mengerdilkan Islam.

Pengemban dakwah harus mampu menyadarkan umat tentang apa yang sebenarnya mereka inginkan dengan ungkapan yang benar lagi tepat, bukan sekadar dengan ungkapan yang mirip yang ditemukan dalam konsep peradaban di luar Islam.

Produktifkan Umat dengan Ekspresi yang Benar

Umat akan dengan suka rela menempuh jalan perubahan ke arah peradaban Islam jika dan hanya jika terpenuhi syarat berikut: 1. Umat menyadari kebobrokan system kehidupan saat ini, 2. Umat melihat adanya sistem kehidupan lain yang lebih baik dan *feasible* (yakni Islam), dan 3. Umat merasa yakin sanggup menanggung konsekuensi atas perjuangan yang akan dilakukan.

Pengemban dakwah harus mampu meyakinkan umat bahwa kemarahan dan kekhawatiran yang dirasakan atas RUU HIP adalah bukti nyata kebobrokan sistem kehidupan saat ini. Pun harus mampu meyakinkan umat bahwa eksistensi Hagia Sophia beserta sejarah yang dimilikinya adalah bukti bahwa sistem Islam itu bukan hanya *feasible* melainkan memang pernah eksis bahkan berjaya.

Sudah saatnya bagi para pengemban dakwah untuk kembali mengkaji sirah dan sejarah Islam untuk dapat menghadirkan gambaran perjuangan dalam menegakkan kehidupan Islam yang akan mewujudkan keinginan terdalam mereka. Meyakinkan bahwa perjuangan itu memang tidaklah mudah tetapi *feasible* dan *bearable*.

Sudah saatnya kita tampil membawa narasi gamblang bahwa umat tak ingin lagi hidup dalam cengkeraman Sekularisme dan menginginkan semakin besarnya peran agama dalam kehidupan publik hingga umat dapat meraih kedudukannya sebagai pemimpin peradaban nan digdaya sebagaimana umat terdahulu yang hidup di bawah kepemimpinan Muhammad Al Fatih yang mampu menguasai simbol puncak peradaban dunia. Sudah saatnya kita ungkapkan bahwa kegelisahan ummat adalah indikasi perlunya pengkajian ulang atas ideologi yang menjadi landasan kehidupan selama ini. Sekaranglah saatnya membumikan diskursus tentang ideologi, mengajak semua kalangan mengkaji tentang pemikiran mendasar mengenai manusia, alam semesta, dan kehidupan. Juga tentang visi kehidupan manusia di Bumi, untuk apakah dia diciptakan?

Yogyakarta, 2 Dzulhijjah 1441 H

Wednesday, July 22, 2020

8.49 p.m.

Haafizhah Kurniasih